

Analisis Fiskal Dampak Kebijakan Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia: Pendekatan Ekonomi Pembangunan

Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Income Distribution in Indonesia: A Development Economics Approach

Novita Nur Maghfiroh

novitanurma18@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract.

This research analyzes the impact of fiscal policy on income distribution in Indonesia using a development economics approach. In the context of increasing income inequality, fiscal policy is expected to play a role in leveling income distribution. The results of the study indicate that targeted government spending and progressive taxation significantly contribute to reducing income inequality. Additionally, investments in the education and health sectors have proven to enhance social mobility and community welfare. The main conclusion of this research is that effective and inclusive fiscal policies can be an important tool in achieving social justice and sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: *Fiscal Policy, Income Distribution, Development Economics*

Abstrak.

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dengan pendekatan ekonomi pembangunan. Dalam konteks ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat, kebijakan fiskal diharapkan dapat berperan dalam meratakan distribusi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang terarah dan pajak progresif berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan terbukti meningkatkan mobilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan fiskal yang efektif dan inklusif dapat menjadi alat penting dalam mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Distribusi Pendapatan, Ekonomi Pembangunan

Pendahuluan

Kebijakan Fiskal adalah salah satu alat paling penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian. Menurut Irwan (2023) Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk investasi sosial, memperbaiki kondisi kerja, dan mengatasi inflasi serta ketidakstabilan ekonomi global. Di Indonesia, kebijakan fiskal telah memainkan peran penting dalam berbagai konteks, terutama dalam mengatasi tantangan ekonomi global dan domestik. Manik et al. (2024) Menyatakan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap permintaan agregat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejarah pengembangan keuangan di Indonesia mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen ini untuk mengatasi berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis moneter pada akhir 1990-an dan penurunan ekonomi global pada tahun

2008. Selama pandemi COVID-19, kebijakan fiskal menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandemi menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor, mengurangi pendapatan nasional dan meningkatkan pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan keuangan, termasuk peningkatan belanja pemerintah dan penciptaan insentif keuangan. Ma'ruf dan Andriansyah (2022) mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan selama pandemi, termasuk program perlindungan sosial, bantuan langsung tunai, dan dukungan terhadap sektor kesehatan, telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian Indonesia. Pengetahuan publik yang meningkat, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di tengah tantangan sosial. Selain itu, perencanaan keuangan dapat membantu meringankan stagnasi ekonomi dan meningkatkan keamanan komunitas. Pengembangan ekonomi adalah isu yang kompleks yang memerlukan solusi menyeluruh. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah dan individu melalui redistribusi pendapatan dan sumber daya yang adil. Dalam konteks yang lebih besar, kebijakan fiskal harus diintegrasikan dengan kebijakan moneter untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan moneter, yang membatasi penggunaan mata uang dan jumlah uang yang tersedia, juga memainkan peran penting dalam mengatur perekonomian. Handoko et al. (2023) menekankan pentingnya kebijakan keuangan dan moneter dari perspektif syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai hasil yang diinginkan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu mengurangi inflasi, menjaga stabilitas moneter, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang tampak.

Sebagai contoh, ketika kebijakan fiskal dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan moneter, dampaknya terhadap permintaan agregat dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan fiskal, distribusi pendapatan dan ekonomi pembangunan. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai aspek kebijakan fiskal dari pembangunan ekonomi di Indonesia, serta rekomendasi untuk kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dan jangka panjang untuk kebijakan fiskal. Selain itu, studi ini akan melihat bagaimana kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah dan tren global. Dengan beradaptasi pada perubahan lingkungan ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas, dan perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, kebijakan fiskal akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi volatilitas. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal adalah aspek penting dari ekonomi Indonesia.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, distribusi pendapatan yang tidak merata tetap menjadi isu yang signifikan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan perpajakan, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dengan pendekatan ekonomi pembangunan. Dengan memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat

mempengaruhi ketimpangan pendapatan, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui analisis data dan penerapan model ekonomi, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara pengeluaran pemerintah, pajak progresif, dan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, serta berkontribusi pada upaya mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ansem Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan, Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.

Pembahasan

a. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau distribusi pendapatan. Menurut Irawan (2023), tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan investasi dan mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial, yang pada gilirannya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di segala arah. Pendekatan ini mengusulkan bahwa pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dapat berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manik et al. (2024), kebijakan fiskal Indonesia sangat mempengaruhi permintaan agregat, baik dalam bentuk panjang maupun pendek. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi dan investasi domestik, tetapi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ancaman eksternal. Menurut penelitian mereka, kebijakan fiskal yang diterapkan dengan benar dapat menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selama pandemi COVID-19, kebijakan fiskal mempertahankan peran yang lebih kritis. Menurut Ma'ruf dan Andriansyah (2022), kebijakan fiskal ekspansif, seperti penguatan belanja pemerintah dan penerbitan insentif fiskal, sangat membantu dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dalam lingkungan yang menantang. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai stimulasi ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi efek negatif dari pandemi terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Menurut Handoko et al. (2023), sangat penting bagi lembaga keuangan dan institusi keuangan untuk bekerja sama guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Mereka percaya bahwa kombinasi kebijakan moneter dan keuangan yang tepat dapat membantu meredam inflasi, menjaga stabilitas tukar, dan

memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sinergi ini sangat penting dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi. Di tingkat daerah, kebijakan fiskal juga menunjukkan dampak positif.

Menurut Parera (2022), Papua Nugini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan rasa aman masyarakat secara umum. Melalui anggaran yang lebih luas untuk pengembangan infrastruktur dan program sosial, inisiatif ini telah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan kemiskinan. Fachrudin (2023) menjelaskan bahwa aktivitas fisik di era digital, seperti penerapan cukai terhadap *digital games*, dapat meningkatkan pendapatan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa adaptasi fisik terhadap perubahan teknologi dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi suatu negara (Sari et al. 2024).

Dampak kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan. Berikut penjelasan lengkapnya:

Dampak Positif (Mengurangi Ketimpangan Pendapatan)

1. Pajak Progresif
 - Pajak yang dikenakan lebih tinggi pada golongan pendapatan tinggi dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
 - Contoh: Pajak penghasilan dengan tarif bertingkat.
2. Belanja Sosial
 - Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai program sosial seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (bansos).
 - Ini membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Subsidi dan Bantuan Langsung
 - Subsidi energi, pangan, dan bantuan langsung tunai (BLT) dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
4. Investasi di Infrastruktur dan Pendidikan
 - Belanja pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM, yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan pendapatan jangka panjang.

Dampak Negatif (Memperparah Ketimpangan Pendapatan)

1. Pajak Regresif atau Konsumtif
 - Pajak yang bersifat flat atau konsumsi seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) cenderung membebani kelompok miskin karena persentase pengeluaran terhadap pendapatan mereka lebih besar.
2. Belanja Negara Tidak Tepat Sasaran

- Jika belanja pemerintah lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya (misalnya proyek infrastruktur yang hanya menguntungkan elite), maka ketimpangan bisa meningkat.

3. Korupsi dan Inefisiensi

- Penyelewengan dana publik dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

Kebijakan fiskal dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperbaiki distribusi pendapatan, jika dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi. Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik, kebijakan fiskal juga bisa memperburuk ketimpangan.

b. Distribusi Pendapatan

Penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat umum dikenal sebagai Distribusi Pendapatan. Maksudnya Distribusi Pendapatan mengacu pada jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat umum, yang lebih besar dari jumlah lapisan dalam populasi umum, sehingga kesejahteraan hanya dapat ditentukan oleh golongan terkait saja (Meydiasari and Soejoto n.d.). Salah satu jenis ketidakmerataan dari perspektif aset adalah distribusi pendapatan. Ada jenis ketidakmerataan lain yang dapat diamati dari aspek lain, seperti kekuasaan, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan sebagainya. Menurut Arsyad (2010), distribusi pendapatan dapat dibagi menjadi tiga kategori: distribusi pendapatan untuk individu, distribusi pendapatan untuk sektor, dan distribusi pendapatan untuk daerah. Distribusi Pendapatan Perorangan adalah indikator paling umum dan aman yang menunjukkan hubungan antara individu dan pendapatan mereka masing-masing. Namun, ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan baik, seperti bagaimana cara mendapatkan pendapatan sumber, sumber pendapatan yang bersifat lokasi-spesifik, dan sumber pendapatan okupasional.

Masing-masing dari kelompok yang bersangkutan. Distribusi pendapatan fungsional juga dikenal sebagai distribusi pangsa pendapatan atau distribusi faktor produksi (distribusi pangsa faktor). Distribusi pendapatan ini menjelaskan pangsa yang ditentukan oleh masing-masing faktor produksi, termasuk tanah, modal, kewirausahaan, dan tenaga kerja. Persentase keseluruhan tenaga kerja (upah) akan dibandingkan dengan persentase keseluruhan sewa, bunga, dan laba berwujud. Ketika menentukan tingkat harga dari masing-masing faktor produksi, distribusi pendapatan fungsional memiliki relevansi yang cukup tajam karena tidak memperhitungkan pengaruh faktor non-pasar, seperti faktor politik. Distribusi regional adalah jenis distribusi yang didasarkan pada batas geografis, seperti antara kota atau provinsi, antara pulau, atau antara desa-kota (Ihsani and Rohman 2022). Distribusi pendapatan ini dapat menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam tingkat kesejahteraan antara setiap daerah atau wilayah Alasan untuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan ini meliputi, antara lain, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan sumber daya air (Sahla, Harahap, and Nawawi n.d.). Hidayah et.al (2022) menambahkan bahwa Penyebaran investasi yang tidak merata menghambat potensi penurunan kemiskinan secara maksimal. Daerah perbatasan yang minim investasi baru kesulitan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga disparitas pendapatan dengan wilayah non-perbatasan tetap melebar.

Strategi Distribusi Yang Adil Dan Merata

Strategi distribusi yang memadai dan wajar sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran Indonesia. Salah satu strategi yang paling penting adalah pajak progresif, yang menurunkan tarif pajak untuk kelompok dengan pendapatan tinggi dan meningkatkannya untuk kelompok dengan pendapatan rendah. Pajak progresif ini memiliki potensi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan menjadi dasar bagi inisiatif pemerintah untuk mengembangkan program sosial dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan melakukan ini, pemerintah dapat mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dengan mendistribusikan kembali sumber daya. Selain pajak, pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan pendidikan. Sasaran subsidi yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan standard hidup komunitas miskin dengan mengurangi biaya hidup di rumah mereka, memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengakses layanan esensial seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Agar dampaknya memiliki pengaruh yang sekecil mungkin terhadap kemiskinan, penting untuk memastikan bahwa subsidi memadai hingga titik di mana mereka dibutuhkan oleh individu-individu tersebut. Unsur penting lainnya dalam mencapai distribusi pendapatan yang tepat adalah strategi keuangan inklusif. Berbagai program, seperti Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah dibuat oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu warga miskin atau penduduk kota kecil dalam mendapatkan akses lebih banyak terhadap sumber daya keuangan.

Strategi distribusi yang efektif untuk pendapatan Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur di luar program-program. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum di kota-kota kecil dapat memberikan akses ke berbagai peluang ekonomi dan memudahkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih besar. Pemerintah sedang berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat umum berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara bertanggung jawab. Namun, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada beberapa cara yang digunakan. Masalah birokrasi, ketidakmerataan implementasi antara wilayah, dan transparansi sering menjadi hambatan untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil. Tekanan yang diperlukan untuk koordinasi antara lembaga pemerintah daerah dan lokal serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program yang dimaksud berjalan dengan lancar. Dipercaya bahwa strategi-strategi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan rasa keamanan populasi miskin di Indonesia jika diimplementasikan dan diintegrasikan dengan baik (Hannifah, Arif, and Noviarita 2023).

Selain pembangunan infrastruktur, strategi distribusi pendapatan pemerintah juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Investasi pada sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan adanya akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, masyarakat di daerah tertinggal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang efektif tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas distribusi pendapatan pemerintah. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran, penyaluran bantuan, serta pengawasan program pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, digitalisasi mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi, terutama di daerah terpencil. Dengan dukungan tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga yang kuat, serta pengawasan yang berkelanjutan, strategi distribusi pendapatan pemerintah diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di Indonesia.

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Setelah Pajak per Kapita Menurut Golongan Rumah Tangga (ribu rupiah), 2000, 2005, dan 2008

Golongan Rumah Tangga	2000	2005	2008
Rumah tangga buruh tani	2 268.30	4 511.90	5 857.40
Rumah tangga pengusaha pertanian	3 323.30	6 706.50	11 233.50
Rumah tangga petani gurem	2 590.20	5 174.40	--
Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0,5–1 ha	3 884.60	7 831.20	--
Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan lebih dari 1 ha	5 449.10	10 971.10	--
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di desa	3 734.50	8 436.60	13 164.10
Rumah tangga bukan angkatan kerja di desa	4 800.40	9 309.10	14 773.10
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa	7 708.90	15 956.70	28 346.00
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di kota	5 844.70	10 738.90	18 279.70
Rumah tangga bukan angkatan kerja di kota	6 799.90	11 178.40	19 110.70
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota	10 512.60	22 265.00	39 968.50

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya

Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

Simpulan

Studi ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen strategis dalam upaya memperbaiki distribusi pendapatan di Indonesia, khususnya dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan ekonomi pembangunan, terlihat bahwa intervensi negara dalam bentuk pajak dan pengeluaran publik tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi makroekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan antar kelompok sosial. Secara umum, kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Sistem perpajakan progresif memberikan kontribusi signifikan dalam menarik sumber daya dari kelompok berpendapatan tinggi untuk kemudian dialokasikan ke sektor-sektor yang menunjang kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, seperti pendidikan, kesehatan, dan

bantuan sosial. Belanja negara yang diarahkan secara tepat dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, membuka kesempatan kerja, dan mendorong mobilitas sosial.

Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Ketidaktepatan sasaran belanja, ketimpangan dalam distribusi dana antar wilayah, serta masih dominannya pajak tidak langsung (yang cenderung regresif) menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah juga memperkuat ketimpangan horizontal, terutama antara daerah maju dan tertinggal. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, pemerintah perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan fiskal, memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial, serta melakukan reformasi pajak agar lebih progresif dan adil. Sinergi antara kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, dan pemerataan sosial merupakan kunci dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arifianto, Wildan, and Imam Setiyono. n.d. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA."
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*,6(1), 12-20.
- Hannifah, Vita, M. Zhafran Arif, and Heni Noviarita. 2023. "MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG ADIL DAN MERATA DI INDONESIA."
- Hidayah, U., Klau, A. D., & Prima, S. R. (2022). Analisis Ketimpangan Investasi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 70-79.
- Ihsani, Salim Fauzanul, and M. Fathur Rohman. 2022. "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi-Qu* 12(1):1. doi:10.35448/jequ.v12i1.16292.
- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*,2(2), 01-08.
- Manik, C. W., Silaban, K., Mnurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, P. S. M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*,2(1), 137-146.

- Ma'ruf, M. R., & Andriansyah, E. H. (2022). KEBIJAKAN FISKAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346-356.
- Meydiasari, Dewi Azizah, and Dr H. Ady Soejoto. n.d. "Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia."
- Sahla, Hilmiatus, Isnaini Harahap, and Zuhri M. Nawawi. n.d. "ANALISA KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM TEORI EKONOMI."
- Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, and Arif Fadilla. 2024. "Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1(4):1–10. doi:10.47134/jae.v1i4.231.